

IMPLEMENTASI PROGRAM INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF PENURUNAN STUNTING DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Haidil Rivaldiansyah, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Intervensi Spesifik dan Sensitif Penurunan Stunting Di Kota Samarinda.

Pengarang : Muhammad Haidil Rivaldiansyah

NIM : 2202016020

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 10 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP
NIP 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan :	eJournal Administrasi Publik
Volume :	14
Nomor :	1
Tahun :	2026
Halaman :	160-174

IMPLEMENTASI PROGRAM INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF PENURUNAN STUNTING DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Haidil Rivaldiansyah ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Angka kondisi stunting di Kota Samarinda yang belum menunjukkan penurunan signifikan mendorong pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya penurunan kondisi stunting melalui pelaksanaan program intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting di Kota Samarinda dan mendeskripsikan faktor penghambatnya. Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif dan interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program intervensi spesifik dan sensitif di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal, sebab komunikasi yang terjalin belum secara jelas dan tepat dilaksanakan sehingga menimbulkan kebingungan pada masing-masing sektor pelaksana, di satu sisi dukungan sumber daya yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan juga mempengaruhi pelaksanaan program intervensi. Walaupun demikian komitmen secara positif telah terbentuk pada Dinas Kesehatan Kota, puskesmas, dan posyandu serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai pelaksana intervensi, demikian pada pembagian wewenang dan irisan dari masing-masing intervensi melalui Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 membantu dan memudahkan pelaksana intervensi dalam menentukan upaya yang akan dilakukan sesuai peran dan fungsinya. Di satu sisi pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif masih dihadapkan pada beberapa hambatan seperti alur komunikasi yang belum jelas, ketersediaan tenaga pelaksana dan anggaran, serta pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap kepentingan pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting.

Kata Kunci : *implementasi, kebijakan stunting, intervensi spesifik, intervensi sensitif, kota samarinda*

Pendahuluan

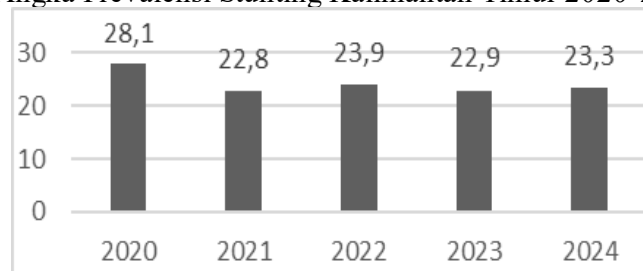
Sejak tahun 2024 angka prevalensi *stunting* secara nasional masih belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan melalui Rencana Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aidilrivaldiansyah@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimana angka prevalensi *stunting* diharapkan dapat berada pada angka 14% di tahun 2024, hal ini pada akhirnya mendorong pemerintah dalam mengupayakan pencapaian angka prevalensi tersebut melalui berbagai intervensi baik secara spesifik dan juga sensitif, di satu sisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan dan mengupayakan penurunan *stunting* serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah *stunting* secara koimprehensif (Anggraini et al., 2024). Berdasarkan data Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menunjukkan angka prevalensi *stunting* di Provinsi Kalimantan Timur berada pada level >20% yang mana dalam hal ini masuk pada kategori sedang, dan belum sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

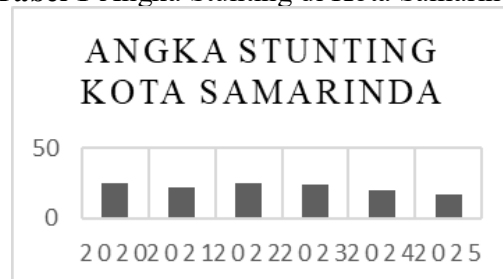
Tabel 1 Angka Prevalensi Stunting Kalimantan Timur 2020-2025



Sumber : Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kalimantan Timur dari tahun 2020-2026 cenderung menunjukkan angka tren fluktuatif yang mana secara keseluruhan belum terlihat adanya penurunan yang signifikan, ini juga menandakan bahwa upaya penurunan kondisi *stunting* di Kalimantan Timur belum berjalan dengan optimal. Kota Samarinda menjadi salah satu Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang mengalami penurunan angka *stunting* tidak stabil dan juga belum dapat mencapai standar nasional yaitu 14%, adapun angka prevalensi *stunting* di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 1 Angka Stunting di Kota Samarinda



Sumber : Data diolah penulis, 2025

Sebagai upaya serius dan komitmen pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi persoalan ini mengeluarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 45 tahun 2023 tentang penurunan *stunting* di daerah. Adapun perwali ini dikeluarkan

sebagai respons dan juga langkah strategis pemerintah dalam mendukung dan mendorong pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Samarinda melalui keterlibatan berbagai lembaga dari sektor kesehatan hingga pada lintas sektor melalui pelaksanaan program intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Program intervensi spesifik berfokus pada penanganan penyebab langsung *stunting*, khususnya pada kelompok sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, terutama Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Sementara itu, program intervensi sensitif diarahkan pada penanganan faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi kondisi *stunting*, seperti sanitasi, lingkungan, ketahanan keluarga, dan pengendalian penduduk. Pelaksanaan intervensi sensitif melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah di luar sektor kesehatan, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

Di Kota Samarinda pelaksanaan program intervensi spesifik dan intervensi sensitif penurunan angka *stunting* masih belum berjalan dengan optimal sehingga hal ini juga menyebabkan penurunan kondisi *stunting* di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program intervensi mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan, terlebih lagi kondisi internal pelaksana dari sisi kedinasan masih belum sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan, sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang tidak terlaksana dengan optimal. Maka demikian berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perihal Implementasi Program Intervensi Spesifik dan Sensitif Penurunan Stunting di Kota Samarinda, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program intervensi spesifik dan intervensi sensitif penurunan *stunting*. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti dari aspek pelaksanaan dan juga kondisi di lapangan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan secara umum sering kali diartikan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana aturan ini tujuannya untuk mengatur masyarakat berkaitan dengan suatu hal. Secara harfiah kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud tertentu, kebijakan itu sendiri dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan ini yang membuat kebijakan dibuat berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan hidup masyarakat (Widodo, 2022). Kemudian kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Ketika sebuah pelanggaran terjadi maka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam tahapan ini ada lembaga khusus yang bertugas untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Kebijakan ini juga merupakan

putusan politik yang mana dibuat dan didanai oleh lembaga publik melalui pungutan secara kolektif melalui pajak ataupun retribusi (Nugroho, 2021).

Adapun kebijakan menurut Dye dalam (Igirisa, 2022) bahwa kebijakan ialah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Tentunya ketika pemerintah memutuskan melakukan sesuatu memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan negara mempunyai pengaruh yang sama besarnya.

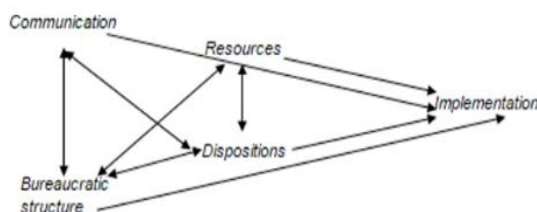
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya dengan melibatkan berbagai aktor dari lintas sektor yang mana tahapan ini dilakukan agar tujuan kebijakan tercapai sebab apabila tahapan ini tidak dilakukan maka kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan (tidak berguna). Sebagaimana pandangan Dunn dalam (Igirisa, 2022) yang mana dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak bermakna. Adapun Grindle dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam sebuah prosedur, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, dan menyangkut siapa yang memperoleh dari hasil suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan dan dipengaruhi faktor-faktor seperti struktur organisasi, kompetensi administratif, sumber daya, serta faktor lainnya (Arafat, 2023).

Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)

Menurut Edward III ada 4 (empat) indikator yang menentukan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, dan 4 (empat) indikator ini juga yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Adapun 4 (empat) indikator ini diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Maharani, 2022). Adapun indikator ini berkaitan dengan upaya proses implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif dalam implementasinya.

Gambar 1 Model Implementasi Edward III



Sumber: George C. Edward III dalam (Igrisa, 2022)

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan, jelas, dan konsisten disampaikan.
2. Sumber daya, proses pelaksanaan implementasi tidak lepas dari yang namanya dukungan sumber daya.
3. Disposisi diartikan sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
4. Struktur birokrasi walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Stunting

Kondisi *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, hal ini terjadi terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), terhitung sejak masa mengandung sang ibu hingga pada masa setelah kelahiran. Dampak dari kondisi *stunting* bersifat multidimensional karena tidak hanya berdampak pada masa pertumbuhan fisik anak saja akan tetapi berkelanjutan hingga pada masa perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir serta produktivitas ketika masa dewasa (Hasanah et al., 2025). Kondisi *stunting* dapat dikenali dengan melakukan pengukuran terhadap tinggi badan apabila angka menunjukkan di bawah standar pertumbuhan anak menurut WHO maka anak atau balita tersebut kemungkinan mengalami kondisi *stunting*. Hal ini dibuktikan dengan melakukan pengukuran terhadap balita melalui pengukuran *World Health Organizatin-Multicentre Growth Reference Study* (WHO-MGRS) yang mana baku tinggi kategori pendek berada pada angka z-score adalah -2 SD (Standar Deviasi) dan kemudian jika anak berada pada angka -3 SD maka anak dikategorikan kondisi *stunting* (Neherta & Asri, 2022)

Program Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Intervensi spesifik merupakan program penanganan *stunting* yang mana melakukan pencegahan penyebaran *stunting* melalui pendekatan faktor penyebab langsung *stunting*. Program ini mencakup asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dimana program ini dituju secara khusus kepada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan oleh sektor kesehatan dalam penelitian ini pelaksanaan kegiatan ini dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai penggerak utama dalam penanganan *stunting*. Upaya yang dilakukan melalui sektor kesehatan ini menjadikan salah satu rencana strategis dalam mendorong penurunan angka *stunting*, walaupun pelaksanaan ini dilakukan oleh sektor kesehatan dalam jangka pendek dan hasilnya relatif singkat, akan tetapi kontribusi yang diberikan dapat membantu mendorong pencegahan peningkatan angka kondisi *stunting*.

Adapun yang dimaksud dengan program intervensi sensitif ialah rencana strategis dan juga program yang berperan penting dalam mencegah dan mendorong penurunan angka *stunting*. Intervensi sensitif sendiri tidak berfokus langsung pada pemberian gizi, melainkan menyasar pada lintas sektor yang mana dalam pelaksanaannya berfokus pada upaya penurunan kondisi *stunting* pada faktor luar yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada peningkatan angka *stunting* seperti misalnya upaya penurunan melalui pemenuhan fasilitas penyediaan dan pemastian akses air bersih dan sarana sanitasi kemudian peningkatan akses serta kualitas pelayanan gizi yang mencakup pada peningkatan pemahaman atau wawasan terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, serta kesehatan dan ketahanan keluarga baik ibu dan anak sebagai upaya pencegahan peningkatan angka *stunting*, yang mana dalam penelitian ini mengacu bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Adapun pelaksanaan program intervensi sensitif ini dilakukan sebab intervensi ini memiliki pengaruh besar dalam mendorong dan juga mendukung keberhasilan program intervensi penurunan *stunting* (Hasanah et al., 2025).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis fenomenologi, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam terkait objek penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait Implementasi Program Intervensi Spesifik dan Sensitif Penurunan Stunting di Kota Samarinda, adapun fokus penelitian meliputi implementasi program beserta dengan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program. Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (Hardani et al., 2020), dan juga data sekunder yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan dilakukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis

model Miles dan Huberman yang mengacu pada 4 (empat) tahapan yaitu koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Intervensi Spesifik dan Sensitif Penurunan Stunting Di Kota Samarinda

1. Implementasi Program Intervensi Spesifik

Komunikasi

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan publik dalam hal ini komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi pelaksana kebijakan, di sisi lain pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik mengharuskan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas termasuk dalam hal tujuan dan sasaran, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Marwiyah, 2022). Pelaksanaan program intervensi spesifik di Kota Samarinda masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pelaksana belum sepenuhnya dipahami dengan baik, adanya perbedaan persepsi antar dinas terhadap maksud dan tujuan program intervensi mempengaruhi pelaksanaan intervensi spesifik yang dirancang dan dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Dinas Kesehatan Kota Samarinda turut melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kota Samarinda melalui penyuluhan berbasis pemberian teori dan praktik hal ini mendorong pemahaman dan alur komunikasi yang lebih jelas perihal upaya penurunan *stunting*. Sejalan dengan temuan (Suswanta et al., 2026) penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada kader posyandu berdampak positif dalam memahami secara mendalam peran serta faktor risiko *stunting* dalam upaya penurunan kondisi *stunting*. Komunikasi yang efektif terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda secara konsisten, dari berbagai tingkatan pihak yang terlibat. Informasi yang disampaikan secara jelas kepada seluruh pelaksana akan mendorong pelaksanaan program berjalan lebih sesuai dan tepat sasaran (Kurniawan et al., 2021). Di sisi lain koordinasi, dan monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda kepada Puskesmas dan Posyandu sebagai pelaksana intervensi spesifik di lapangan juga menjadi bagian dari menjaga komunikasi tetap berjalan secara konsisten, sehingga pelaksanaan program tetap sesuai dengan rancangan rencana dan maksud serta tujuan program.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan memegang peranan penting sebab adanya sumber daya yang mendukung implementasi menentukan bagaimana kualitas proses kebijakan berjalan dan dicapai. Edward III dalam (Widodo, 2022) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan, sehingga ketersediaan sumber daya harus mencukupi

dari segi jumlah dan keahlian, di satu sisi dikatakan juga bahwa dukungan anggaran menjadi sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan sebab ketika anggaran yang dimiliki terbatas hal ini akan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi serta berdampak pada kualitas pelaksanaan program. Sesuai dengan Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 anggaran pada pelaksanaan program intervensi spesifik telah diatur yang mana keseluruhan anggaran yang ada bersumber dari APBD, BOK, dan DAK dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Ketersediaan anggaran sejauh ini masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena kebutuhan operasional program yang tinggi dan luasnya cakupan sasaran program membatasi anggaran yang ada. Di satu sisi pelaksanaan program intervensi spesifik juga dihadapkan pada tantangan dimana jumlah pelaksana program baik dari tingkat Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Puskesmas, dan juga kader-kader posyandu masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jumlah tenaga ahli gizi terutama pada tingkat puskesmas di Kota Samarinda masih belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan, hal ini turut mempengaruhi beban kerja dan cakupan sasaran program. Pada tingkat posyandu ketersediaan kader masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan yang secara keseluruhan belum optimal. Hal ini menguatkan temuan (Pakaya & Kadir, 2023) bahwa jumlah dan kapasitas dari pelaksana akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dan akan gagal ketika minimnya ketersediaan dan kemampuan pelaksana yang tidak sesuai. Kebutuhan fasilitas pendukung pelaksanaan program intervensi spesifik dalam upaya membantu penurunan stunting belum sepenuhnya diadakan secara merata, hal ini dikarenakan proses pengajuan yang dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kota Samarinda disesuaikan dengan urgensi dari masing-masing wilayah intervensi, hal ini juga dikarenakan adanya pembangunan posyandu secara luas sehingga pemerataan pemberian fasilitas tidak dapat dilakukan secara optimal.

Disposisi

Dukungan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan program intervensi spesifik terlebih pada koordinasi dan kolaborasi yang terjalin dengan puskesmas dan posyandu. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab yang jelas atas peran dan fungsinya dalam menjalankan program intervensi spesifik, sehingga mendukung kelancaran proses implementasi program sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di satu sisi puskesmas dan posyandu menunjukkan komitmen mereka dalam pelaksanaan intervensi spesifik yang dilakukan di lapangan, pengukuran pada balita yang dilakukan setiap periode membuktikan akan komitmen terhadap peran dan tanggung jawabnya. Terlebih adanya dukungan yang diberikan melalui insentif kepada kader posyandu berdampak positif terhadap meningkatnya komitmen dari masing-masing kader posyandu, hal ini menguatkan temuan (Pakaya & Kadir,

2023) yang menyatakan bahwa pemberian insentif memberikan pengaruh cukup besar serta dorongan dukungan terhadap peningkatan kinerja pelaksana.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi dan peranan penting yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2022) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila di dalamnya terdapat struktur birokrasi yang dibedakan menjadi dua hal yaitu standar operasional prosedur dan juga fragmentasi. Pada program intervensi spesifik penurunan *stunting* di Kota Samarinda telah diatur pelaksanaannya dalam sebuah buku petunjuk yang berisi panduan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan program intervensi spesifik yang mana buku ini diberi nama buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) SOP yang berlaku pada program intervensi spesifik telah disesuaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang telah dilaksanakan sesuai apa yang dimuat pada Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023. Namun demikian, efektivitas pembagian kerja tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugas di lapangan. Adanya dukungan struktur birokrasi yang sesuai dan jelas memudahkan proses implementasi program lebih optimal, sebagaimana temuan (Kurniawan et al., 2021) yang menyatakan bahwa penerapan struktur birokrasi memudahkan pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan, hal ini juga membantu pemerintah dalam membagi tugas dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

2. Implementasi Program Intervensi Sensitif

Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program intervensi sensitif, sebab keterlibatan lintas sektor yang sangat luas. Penyaluran informasi kebijakan menjadi aspek penting karena program ini bersifat lintas sektor yang menuntut koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Kualitas koordinasi yang terjalin antar pihak akan sangat menentukan keberhasilan implementasi, di satu sisi hal ini dilakukan agar tersampaikan kepada semua tingkatan pelaksana (Askandary et al., 2024). Hasil koordinasi yang terjalin antar dinas ditindaklanjuti melalui proses penyampaian informasi program intervensi sensitif yang akan dilaksanakan kepada tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai perantara (*bridge actor*) yang membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan kembali informasi tersebut kepada masyarakat. Sayangnya komunikasi yang terjalin belum dapat ditunjukkan secara optimal sebab adanya ketidakpahaman antar perangkat daerah lintas sektor terkait maksud dan tujuan arah program serta terhadap peran dan fungsi masing-masing lintas sektor. Belum optimalnya kejelasan komunikasi yang berdampak pada ketidakkonsistenan data dan tumpang tindih pelaksanaan sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan

intervensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dan hal ini mempengaruhi capaian upaya penurunan *stunting* di Kota Samarinda.

Walaupun di satu sisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda diketahui bahwa penyampaian informasi program intervensi sensitif secara konsisten telah berjalan dengan cukup baik. Koordinasi yang terjalin berguna sebagai ruang diskusi dan penyampaian terhadap capaian, rencana dan evaluasi pelaksanaan program intervensi sensitif. Upaya yang dilakukan secara konsisten melalui penyuluhan serta komunikasi dengan pihak kader TPK, kelurahan dan kecamatan, guna memastikan bahwa pelaksanaan intervensi sensitif serta maksud dan tujuan program oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya turut menentukan kualitas pelaksanaan program, yang mana dalam hal ini ketika sumber daya yang dimiliki terbatas besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan tidak akan mencapai tujuan secara optimal. Dukungan sumber daya pada pelaksanaan intervensi sensitif oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program intervensi sensitif dalam upaya penurunan kondisi stunting di Kota Samarinda. Sayangnya ketersediaan pelaksana pada program intervensi sensitif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dari segi jumlah dan kemampuan masih kurang memadai dan belum optimal. Tidak seimbangnya jumlah pelaksana dengan kemampuan yang dimiliki pelaksana berdampak pada peningkatan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, terlebih hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ketersediaan anggaran yang telah diatur dalam APBD dan DAK pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda belum cukup untuk dapat mendukung pemerataan secara menyeluruh pada program intervensi sensitif. Keterbatasan yang disebabkan keterlambatan penyaluran anggaran dan ketidaksesuaian pada kebutuhan di lapangan, menjadi penyebab utama anggaran yang ada tidak dapat digunakan secara optimal, di satu sisi hal ini juga disebabkan adanya ketidaksesuaian data yang dijadikan sasaran program. Walaupun demikian pengoptimalan penyerapan anggaran terus dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan. Di satu sisi dukungan ketersediaan pengadaan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan program intervensi sensitif sudah berjalan dengan baik di Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Kota Samarinda dan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Proses mekanisme pengadaan dengan yang melibatkan pihak ketiga (eksternal) melalui perjanjian MoU. Proses pengadaan turut disesuaikan dengan kebutuhan dan data sasaran program hasil dari pendataan dan survei yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ketepatan sasaran program berperan penting dalam menentukan seberapa banyak ketersediaan fasilitas dibutuhkan dalam pelaksanaan program intervensi sensitif *stunting*.

Disposisi

Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif, dengan dukungan tidak hanya dari pemahaman apa yang harus dilakukan oleh implementor kebijakan saja akan tetapi, turut didukung dengan sikap positif dan keinginan yang kuat (Kadji, 2015). Kecenderungan pemahaman persepsi yang berbeda dan kurangnya komitmen dapat menggagalkan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian secara keseluruhan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda komitmen dan semangat yang tinggi ditunjukkan dalam pelaksanaan program intervensi sensitif penurunan *stunting*, hal ini di dukung karena tugas atau peran pada pelaksanaan intervensi serupa dengan beban kerja yang telah dikerjakan dan menjadi bagian dari *jobdesc* sehingga tidak dirasa memberatkan. Selain itu komitmen juga terbentuk dalam pelaksanaan program intervensi sensitif bersama dengan kelurahan dan kecamatan, dukungan yang diberikan serta kemauan antar pihak dalam mencapai penurunan *stunting* melalui intervensi mendorong pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan sesuai dengan rancangan program. Pembentukan ruang diskusi mendorong partisipasi aktif dan komitmen antar pihak. Pengawasan dan juga komitmen yang diberikan oleh pihak kecamatan dan kelurahan dalam membantu pengawasan dan pendataan sasaran program turut mendukung kelancaran pencapaian tujuan program intervensi sensitif oleh dinas. Di satu sisi komitmen dan keselarasan pandangan terhadap maksud dan tujuan program antar lintas pihak yang terlibat menjadi kekuatan dalam mendorong keberhasilan penurunan *stunting*.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program intervensi sensitif penurunan *stunting* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda belum dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program intervensi sensitif. Pelaksanaan program intervensi sensitif dari kedua dinas hanya mengacu kepada poin-poin utama dan tujuan kebijakan yang dimuat pada Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 dan menyesuaikan pada pembagian fungsi dan peran masing-masing pelaksana program intervensi sensitif. Di lain sisi penyebaran atau pembagian peran dan tugas belum terlaksana dengan baik. Pembagian tugas dan peran masing-masing dinas di dukung dengan adanya regulasi yaitu Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 yang mengatur tentang poin poin utama dalam

pelaksanaan intervensi sensitif yang akan dilakukan kedua dinas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih hal ini mempengaruhi intervensi sensitif yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pelaksanaan program intervensi sensitif yang seharusnya dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu justru harus diulang kembali akibat ketidaksesuaian antara pelaksana dengan mekanisme serta pembagian wewenang yang telah ditetapkan melalui koordinasi sebelumnya. Koordinasi yang dilaksanakan dengan maksud menetapkan peran atau irisan dari masing-masing dinas tidak menunjukkan hasil yang memuaskan sebab adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan peran yang dilakukan beberapa dinas, hal ini juga mengakibatkan duplikasi peran dan mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, baik dari segi waktu maupun penggunaan anggaran.

Faktor Penghambat Implementasi Program Intervensi Spesifik dan Sensitif Penurunan Stunting Di Kota Samarinda

Pelaksanaan program penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dihadapkan pada beberapa kendala utama yang mana mempengaruhi proses pelaksanaan program, adapun kendala tersebut diantaranya pada aspek komunikasi yang mana kejelasan terhadap maksud dan tujuan serta peran dari masing-masing sektor tidak dapat dipahami secara jelas, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan menyebabkan tumpang tindih peran serta fungsi dari masing-masing dinas. Akibatnya mempengaruhi proses intervensi yang dilakukan masing-masing sektor. Kemudian kendala selanjutnya terletak pada aspek ketersediaan sumber daya yang mana tenaga pelaksana baik dari segi jumlah dan kemampuan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terlebih lagi tidak meratanya kemampuan dan pengetahuan pelaksana berakibat pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal. Di satu sisi ketersediaan anggaran yang terbatas menyebabkan ketidakseimbangan terhadap kebutuhan program intervensi spesifik dan sensitif yang tinggi dan luas, terlebih ketersediaan anggaran yang bersifat melekat pada program kesehatan secara umum yang mengharuskan alokasi anggaran belum secara keseluruhan di prioritaskan pada kebutuhan intervensi spesifik dan intervensi sensitif oleh masing-masing dinas. Kemudian kurangnya dukungan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat sebagai sasaran program utama intervensi turut menjadi kendala yang mempengaruhi keberhasilan dan capaian program intervensi, hal ini juga disebabkan karena persepsi atau pandangan masyarakat yang salah terhadap maksud dan tujuan program, stigma yang terbentuk di kalangan masyarakat inilah berdampak negatif pada pelaksanaan program intervensi.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi program intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting di Kota Samarinda masih belum berjalan dengan optimal. Pada pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif aspek komunikasi yang terjalin pada pelaksanaan program intervensi dihadapkan pada kejelasan komunikasi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sebab adanya persepsi yang berbeda pada pelaksana program intervensi sehingga berakibat pada tumpang tindih peran yang mempengaruhi peran dan fungsi dari masing-masing dinas. Di satu sisi implementasi program intervensi spesifik dan sensitif dihadapkan pada ketersediaan sumber daya yang belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan luasnya sasaran program, keterbatasan pada tenaga pelaksana dan juga ketersediaan anggaran yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan mempengaruhi pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, terlebih luasnya cakupan program dan sasaran program tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Walaupun demikian komitmen oleh Dinas Kesehatan Kota, puskesmas, dan posyandu serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda hasil yang positif dalam mendukung capaian pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, terlebih dengan adanya SOP serta kebijakan Perwali Kota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 yang mengatur pembagian tugas dan peran serta wewenang dengan jelas serta sesuai dengan peran fungsi dari pelaksana.

Faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi program intervensi spesifik dan intervensi sensitif penurunan *stunting* di Kota Samarinda yaitu kurangnya kejelasan komunikasi yang memuat informasi maksud dan tujuan serta peran intervensi yang mempengaruhi pemahaman masing-masing sektor, terbatasnya ketersediaan sumber daya baik dari segi tenaga pelaksana hingga pada ketersediaan anggaran yang mana belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta cakupan program. Kemudian dari segi masyarakat yang dimana rendahnya partisipasi terhadap program intervensi spesifik dan sensitif serta stigma yang terbentuk di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan intervensi.

Saran

Adapun rekomendasi oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung terkait implementasi program intervensi spesifik dan sensitif penurunan *stunting* di Kota Samarinda, sebagai berikut:

1. Kurang jelasnya maksud dan tujuan program di pahami pihak maka perlu adanya penguatan forum diskusi dan alur komunikasi yang terarah.
2. Tidak seimbangnya ketersediaan tenaga ahli maka perlu adanya penguatan dan pemerataan tenaga ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program dan kondisi di lapangan serta perlunya pelatihan yang diberikan secara merata terutama pada kader-kader posyandu tanpa menggunakan sistem perwakilan.

3. Ketersediaan anggaran yang terbatas maka upaya optimalisasi dan juga pengelolaan anggaran secara tepat perlu dilakukan berbasis kebutuhan, dan penetapan prioritas program
4. Rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat sehingga upaya pendekatan secara sosial kepada masyarakat diperlukan dengan sistem komunikasi interaktif berbasis edukasi, upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan program.
5. Luasnya sasaran program yang dilakukan tidak tepat, sehingga sasaran program intervensi upaya penurunan *stunting* perlu dilakukan, sebab ketidaksesuaian kriteria penetapan KRS terhadap pola hidup dan gaya hidup masyarakat berdampak pada penetapan sasaran intervensi menjadi tidak efektif.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Alfabeta (ed.)). CV Alfabeta.
- Anggraini, S., Muthmainnah, M., Septiani, N., & Suganda, T. (2024). Strategi Intervensi Penanganan Stunting di Indonesia: Studi Literatur. *SEHATI: Jurnal Kesehatan*, 4(1), 15–36. <https://doi.org/10.52364/sehati.v4i1.46>
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek* (A. N. Zarkasyi (ed.)). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Askandary, A. I., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kelurahan Bandarahajo, Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43546>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasanah, N., Agustino, L., & Cadith, J. (2025). STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI INTERVENSI SENSITIF DI KECAMATAN SERANG. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 1069–1078. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4878>
- Igrisa, I. (2022). *Kebijakan Publik, Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris* (I. Muhammad (ed.)). Penerbit Tanah Air Beta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (A. IKAPI (ed.); Kadji, Y.). UNG Press Gorontalo.
- Kurniawan, I., Misnaniarti, M., & Flora, R. (2021). Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(4), 328. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4>

10089

- Maharani, D. (2022). *Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi* (S. V. Susilo (ed.)). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.
- Neherta, M., & Asri, M. N. (2022). *Intervensi Pencegahan Stunting (Pendekatan Terpadu untuk Mencegah Gangguan Pertumbuhan pada Anak)* (E. Chundrayetti (ed.)). CV Adanu Abimata.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Dari Jenis Hingga Arti Penting* (Y. Masda (ed.); Edisi Digi). PT Elex Media Komputindo.
- Pakaya, Y., & Kadir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif dalam Penanganan Stunting di Indonesia. *Jurnal Politeknik Kesehatan Kendari*, 15(2), 1–23. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/1244>
- Suswanta, Sulaksono, T., Riski, & Supardal. (2026). *Keberlanjutan Program Penanganan Stunting Berbasis Kolaborasi Lintas Sektor di Kalurahan Selopamioro*. 6(2), 192–203.
- Widodo, J. (2022a). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)* (T. M. Publishing (ed.)). Media Nusa Creative.
- Widodo, J. (2022b). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik* (TIM MNC Publishing (ed.)). Media Nusa Creative.